

Determinan Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia

Novia Ramadania^{1*}, Nelly Masnila², Henny Yulsiati³

^{1*,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Corresponding Email: noviaramadania562@gmail.com^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 7 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 15 September 2025; Diterima 20 Oktober 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ramadania, N., Masnila, N., & Yulsiati, H. (2025). Determinan Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5604-5610. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5267>.

Abstrak

Studi ini bertujuan mencermati kontribusi dari Temuan Audit, Ukuran Pemda, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penyelesaian serta Pemeriksaan Kerugian Daerah pada Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia. Studi ini berjenis kuantitatif dengan memakai data sekunder yang didapati dari web resmi www.bpk.go.id. Populasinya mencakup 34 provinsi di Indonesia selama 5 tahun dari tahun 2019-2023. Studi ini menggunakan analisa regresi logistik berbantuan aplikasi Eviews 12. Hasil studi ini menampilkan jika dengan parsial Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berkontribusi signifikan positif pada Opini Audit. Lalu untuk, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, serta Penyelesaian Kerugian Daerah tidak berkontribusi pada Opini Audit. Uji simultan menghasilkan jika Ukuran Pemda, Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penyelesaian serta Pemeriksaan, Kerugian Daerah dengan bersamaan berkontribusi signifikan pada Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: Temuan Audit; Ukuran Pemda; Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; Penyelesaian Kerugian Daerah; Opini Audit.

Abstract

This study aims to examine the contribution of Audit Findings, Regional Government Size, Follow-up on Recommendations from Settlement Results and Examination of Regional Losses to the Audit Opinion of Provincial Governments in Indonesia. The quantitative discussion applies secondary reports generated from www.bpk.go.id. The population covers 34 provinces in Indonesia from 2019 to 2023. This study uses logistic regression analysis assisted by the Eviews 12 application. The research results with partial Continuation of Audit Recommendations contribute to Audit Opinion. Then the scale of Local Government, Audit Findings, and Settlement of Regional Losses do not contribute to Audit Opinion. Simultaneous testing results in the scale of Local Government, Audit Findings, continuation of Audit Recommendations, and Settlement of Regional Losses contribute to Audit Opinion on Provincial Government fund data in Indonesia.

Keyword: Audit Findings; Size of Local Government; Follow-up on Audit Recommendations; Settlement of Local Losse; Audit Opinion.

1. Pendahuluan

Reformasi atau perubahan dalam suatu negara terhadap struktur pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan tingkat akuntabilitas. Konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan negara di penjuru dunia, khususnya Indonesia. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi kunci utama untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang baik. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana suatu instansi atau pemerintah bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan negara dituangkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari "Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir". BPK memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit atas LKPD serta memberi waktu 2 bulan untuk BPK melaksanakan pemeriksaan. BPK memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah untuk menilai serta menentukan kerugian negara, memberi pertimbangan untuk menuntaskan kerugian serta memberi penjelasan ahli yang akan dimasukkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Didalam LHP tersebut akan memuat pendapat berupa asumsi auditor mengenai kewajaran atas informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Pada beberapa provinsi di Indonesia mengalami penurunan opini di beberapa tahun yaitu pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Provinsi yang mengalami penurunan opini tersebut mendapat opini WDP. Pada tahun 2020 terdapat 33 dari 34 provinsi mendapat opini WTP, tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat 32 dari 34 provinsi yang mendapat opini WTP. Opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah didapat dari hasil pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, jika tingkat kewajaran tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh pemerintah menjadi semakin baik. Menurut Apriani *et al*, (2024), opini yang menyatakan laporan keuangan yang semakin wajar akan meningkatkan kepercayaan yang diperoleh tentang laporan keuangan tersebut, ketika laporan keuangan memiliki taraf kewajaran yang lebih tinggi, kemungkinan opini pemeriksaan yang diterima oleh pemerintah meningkat. Studi ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana riset terdahulu yang umumnya hanya menguji satu atau dua faktor seperti jumlah temuan audit atau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, sedangkan studi ini menguji empat variabel, yaitu jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian daerah pada opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Selain itu, objek studi ini difokuskan khusus pada level pemerintah provinsi, bukan kabupaten/kota, sehingga di inginkan studi ini bisa memberi ilustrasi yang lebih makro tentang determinan opini audit di tingkat daerah. Dengan menggabungkan keempat variabel tersebut dan fokus pada pemerintah provinsi, di inginkan studi ini bisa memberi kontribusi empiris baru untuk mencermati sebagian faktor yang berkontribusi pada opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan terdahulu, peneliti ingin melaksanakan studi mengenai opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Motivasi ini didasari oleh dua alasan yaitu: Pertama, fenomena terkait peningkatan dan penurunan atau ketidakstabilan perolehan opini audit BPK atas LKPD Provinsi di Indonesia. Kedua, hasil riset sebelumnya berbeda atau terjadi inkonsistensi atas hasil penelitian. Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin melaksanakan studi berjudul "Determinan Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia".

2. Tinjauan Pustaka

Audit merupakan proses penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator utama dalam menilai kualitas laporan keuangan yang disusun oleh

RESEARCH ARTICLE

pemerintah daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti faktor-faktor yang dapat memengaruhi opini audit, seperti temuan audit, ukuran pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan penyelesaian kerugian daerah (Amyulianthy, 2020; Apriani *et al.*, 2024). Temuan audit sering kali mencakup kekurangan dalam penyajian laporan keuangan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang dapat memengaruhi kualitas opini audit yang diberikan oleh auditor. Ukuran pemerintah daerah, yang sering diukur melalui total aset atau anggaran, juga sering dianggap sebagai faktor yang memengaruhi opini audit, meskipun penelitian menunjukkan bahwa faktor ini tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap hasil audit (Rosadi & Okfitasari, 2019). Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam laporan keuangan, yang dapat berkontribusi positif terhadap opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah (Arianto & Heriyanto, 2021). Sementara itu, penyelesaian kerugian daerah berhubungan dengan upaya untuk memitigasi kerugian finansial yang ditemukan dalam laporan keuangan, namun penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ini tidak selalu berkontribusi langsung terhadap opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah (Valentina, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan memengaruhi opini audit pada pemerintah provinsi di Indonesia, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai determinan opini audit di tingkat provinsi.

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji dampak faktor-faktor seperti Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, sebanyak 170 data dikumpulkan dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Pemerintah-pemerintah provinsi ini berfungsi sebagai unit analisis dalam studi ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap opini audit pemerintah, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik, yang merupakan pendekatan model matematis untuk menganalisis hubungan antar variabel yang bersifat dikotomi/biner (Kusumaningtyas, 2022). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis seperti uji Parsial (uji t), uji Simultan (uji F), serta Koefisien Determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data yang dihasilkan dari uji analisa ini mencakup nilai standar deviasi, mean, serta nilai tertinggi dan terendah tiap yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.970588	3.565412	30.32576	0.519000	6.552235
Median	1.000000	3.570000	30.18000	0.510000	0.680000
Maximum	1.000000	5.010000	34.20000	1.000000	863.2000
Minimum	0.000000	2.300000	28.48000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.169457	0.416037	0.964307	0.340196	66.42582

RESEARCH ARTICLE

Dari tabel 1, Opini Audit pemerintah Provinsi, mendapati nilai tertinggi 1,00, terendah 0,00, standar deviasi 0,169457 serta mean 0,970588. Dihasilkan nilai tertinggi 5,01 serta terendah 2,30 ditahun 2019 untuk variabel (X1), dengan standar deviasi 0,416 serta mean 3,565. Didapati nilai tertinggi 34,20, serta terendah 28,48 untuk variabel (X2) dengan standar deviasi 0,964307 serta mean 30,32576. Dihasilkan nilai tertinggi 1,00, terendah 0,00, mean 0,519 serta standar deviasi sebesar 0,340 untuk variabel (X3). Lalu untuk variabel (X4) mendapati nilai tertinggi 863,20, terendah 0,00 standar deviasi 66,43 serta mean 6,55.

Tabel 2. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness

H-L Statistic	4.0881	Prob. Chi-Sq(8)	0.8491
Andrews Statistic	118.3585	Prob. Chi-Sq(10)	0.0000

Dari tabel 2 tersebut, dihasilkan *prob. chi square* sejumlah 0,8491. Atau 0,8491 (> α = 0,05) diasumsikan model regresinya sesuai serta layak atau model dianggap fit.

Tabel 3. Hasil Uji Prediksi Akurasi

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	0.83	4.17	5.00	0.15	4.85	5.00
E(# of Dep=1)	4.17	160.83	165.00	4.85	160.15	165.00
Total	5.00	165.00	170.00	5.00	165.00	170.00
Correct	0.83	160.83	161.66	0.15	160.15	160.29
% Correct	16.58	97.47	95.09	2.94	97.06	94.29
% Inorrect	83.42	2.53	4.91	97.06	2.94	5.71
Total Gain*	13.64	0.41	0.80			
Percent Gain**	14.06	14.06	14.06			

Dari tabel 3, pada kolom *Total Estimated Equation*, mencirikan jika model studi ini memiliki tingkat akurasi prediksi sejumlah 95,09%. Atau dimaknai jika model sanggup mengklasifikasikan observasi dengan tepat sejumlah 95,09% dari seluruh kasus yang dianalisis. Apabila nilai akurasi yang mendekati 100%, model ini dapat dikatakan cukup representatif dan memenuhi syarat sebagai alat prediksi yang efektif, terutama dalam konteks penelitian sosial dan kebijakan publik.

4.1.2 Analisis Regresi Logistik

Nilai konstanta sejumlah 3,619375, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit menyebabkan hasil sejumlah 3,619375. Dengan nilai -1,856376 untuk variabel temuan audit, dapat disimpulkan bahwa jika variabel temuan audit mengalami pertumbuhan sebesar 1 unit, maka variabel opini audit mengalami penurunan sejumlah 1,856376. Dapat disimpulkan bahwa jika variabel ukuran pemda mengalami pertumbuhan sejumlah 1 unit, maka variabel opini audit akan mengalami peningkatan sejumlah 0,153897. Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan nilai regresi sejumlah 9,120897 artinya jika tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan meningkat 1 unit, maka opini audit akan meningkat sejumlah 9,120897 dan penyelesaian kerugian daerah sejumlah -0,003981, maka jika penyelesaian kerugian daerah mengalami pertumbuhan 1 unit, maka variabel opini audit mengalami penurunan sejumlah -0,003981.

$$OA = 3,619375 - 1,856376TA + 0,153897UP + 9,120897TLRHP - 0,003981PKD + \epsilon$$

RESEARCH ARTICLE

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-hitung	Probabilitas	Kesimpulan
X1	-1,856376	-1,375740	0,1689	Tidak Berpengaruh
X2	0,153897	0,376578	0,7065	Tidak Berpengaruh
X3	9,120897	1,984656	0,0472	Berpengaruh
X4	-0,003981	-0,090803	0,9276	Tidak Berpengaruh

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

LR Statistic	12.68994	Avg.log likelihood	-0.095368
Prob(LR statistic)	0.012895		

Dari tabel 5, dihasilkan F_{hitung} pada *LR Statistic* sejumlah 12,68994 dan sig Prob (*LR statistic*) sejumlah 0,012895. Sehingga dianggap jika hasil F_{hitung} 12,68994 melebihi F_{tabel} 2,268931721 ($12,68994 > 2,268931721$) dengan sig 0, 012895 dibawah 0,05 ($0, 012895 < 0,05$), maka diasumsikan jika setiap variabel bebasnya berkontribusi dengan simultan dan signifikan pada Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019-2023.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

McFadden R-squared	0.281279	Mean dependent var	0.970588
S.D. dependent var	0.169457	S.E. of regression	0.155860
Akaike info criterion	0.249560	Sum squared resid	4.008217
Schwarz criterion	0.341789	Log likelihood	-16.21257
Hannan-Quinn criter.	0.286985	Deviance	32.42515
Restr. deviance	45.11508	Restr. log likelihood	-22.55754
LR statistic	12.68994	Avg. log likelihood	-0.095368
Prob(LR statistic)	0.012895		

Dari tabel 6 menghasilkan R-square 0,281279 atau 28,12% yang bisa diasumsikan jika variabel terikat bisa dijabarkan variabel bebasnya sejumlah 28,12% dengan selisih 71,88% dijabarkan atau dipengaruhi variabel diluar studi ini.

4.2 Pembahasan

Studi ini menguji pengaruh Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya atau rendahnya temuan audit tidak mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada temuan audit di suatu daerah, perubahan opini audit yang diberikan oleh BPK belum tentu terpengaruh. Penemuan ini relevan dengan penelitian Salsabila & Wahyudi (2022) dan Meza *et al.* (2023) yang menemukan bahwa Temuan Audit tidak berkontribusi pada Opini Audit. Di sisi lain, hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Amyulianthy *et al.* (2020) dan Rahmi & Ariani (2020) yang menunjukkan bahwa temuan audit berkontribusi secara negatif terhadap opini audit. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, yang diukur melalui total aset, juga tidak berpengaruh terhadap opini audit. Meskipun pemerintah daerah memiliki total aset yang besar, tanpa adanya sistem pengelolaan yang baik, hal ini tidak menjamin tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hasil ini relevan dengan penelitian Rosadi & Okfitasari (2019) dan Sutaryo *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa Ukuran Pemda tidak berkontribusi terhadap Opini Audit, namun bertentangan dengan hasil penelitian Meza *et al.* (2023) dan Apriani *et al.* (2024) yang menemukan bahwa Ukuran Pemda berkontribusi terhadap Opini Audit. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap opini audit. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK akan memperbaiki kelemahan yang ditemukan dan meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

RESEARCH ARTICLE

Oleh karena itu, tingkat tindak lanjut yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan pemerintah provinsi memperoleh opini audit yang lebih baik. Hasil ini mendukung penelitian Arianto & Heriyanto (2021) dan Amyulianthy (2020) yang menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi berkontribusi pada opini audit. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Mutiara *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berkontribusi pada Opini Audit, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan sampel dan periode studi. Terakhir, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara Penyelesaian Kerugian Daerah dan Opini Audit. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian daerah tidak berkontribusi terhadap opini audit, hal ini relevan dengan penelitian Valentina (2022). Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2012) yang menunjukkan bahwa penyelesaian temuan audit berkontribusi pada kualitas data keuangan dan berimplikasi positif pada mekanisme pemerintahan yang lebih baik. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sampel dan periode yang digunakan dalam masing-masing studi.

5. Kesimpulan

Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh Temuan Audit (X1). Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh Ukuran Pemerintah Daerah (X2). Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X3). Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh Penyelesaian Kerugian Daerah (X4). Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah semuanya berdampak pada variabel Y, yang mempengaruhi Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia. Keterbatasan studi ini ada di waktu, sampel, objek serta variabel yang digunakan sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya memasukkan lebih banyak variabel dan melakukan penelitian dengan periode waktu dan objek yang lebih luas.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin berterima kasih pada setiap pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan riset ini, khususnya teruntuk pihak-pihak yang sudah memberi informasi serta data terkait lainnya yang diperlukan dalam riset ini.

7. Referensi

- Amyulianthy, R., Anto, A., & Budi, S. (2020). Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Apriani, R., Yulsiati, H., & Aryani, Y. A. (2024). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pemerintahan daerah provinsi se-Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 5(1).
- Arianto, H., Heriyanto, M., & Karneli, O. (2021). KSPI, KTPPU, TLRHP dan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 13–22.
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109-125.

RESEARCH ARTICLE

- Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., Nugroho, W. C. A., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan Eviews*. Lamongan: Academia Publication.
- Kusumawati, D. K., & Ratmono, D. (2017). Determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 177-191.
- Meza, K. U., Martini, R., & Armaini, R. (2023). Determinan Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 152-160.
- Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(2), 95–110. <https://doi.org/https://jequi.ridwaninstitute.co.id/index.php/jequi/article/view/99>.
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4).
- Ramadania, N. (2025). *Determinan Opini Audit Pemerintah Provinsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap opini audit BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2), 148. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.326>.
- Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh temuan audit, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pada pemerintah daerah di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 38–45. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.515>.
- Sari, D. (2012). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. *Indonesian Journal of Economics and Business*, 2(2).
- Valentina, J. (2022). Pengaruh temuan SPI, temuan kepatuhan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah terhadap opini audit di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(6), 952–970.